

PENGELOLAAN DANA SEKOLAH SECARA EFEKTIF DALAM MENGHADAPI EFISIENSI ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN 2026 DI SMAN 4 PALANGKA RAYA

Alpie¹, Niko², Mista Dewi³, Listiani Agustin⁴, Vionna Adelina Toli⁵, Ratih Sulistyowati⁶

alpienew@gmail.com¹, nikovich890@gmail.com², mistadewi2006@gmail.com³,
jhlistianiagustin46@gmail.com⁴, vionnaadelina@gmail.com⁵, ratihsw13@gmail.com⁶

Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana sekolah secara efektif dalam menghadapi dampak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara yang berlanjut pada tahun anggaran 2026 di SMAN 4 Palangka Raya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMAN 4 Palangka Raya mengelola pembiayaan dari dua sumber utama, yaitu dana BOS/BOSP dari pemerintah pusat dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dari orang tua siswa. Perencanaan anggaran disusun dalam bentuk RAPBS dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sekolah merespons kebijakan efisiensi melalui perencanaan fleksibel, penetapan skala prioritas yang tepat, dan tertib administrasi keuangan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana; Efisiensi Anggaran; Pembiayaan Pendidikan; RAPBS; Transparansi Keuangan

ABSTRACT

This study aims to describe effective school fund management in facing the impact of Presidential Instruction (Inpres) Number 1 of 2025 on State Expenditure Efficiency, which continued into the 2026 fiscal year at SMAN 4 Palangka Raya. A qualitative descriptive method was employed with data collection through observation and direct interviews with school principals, vice principals, and administrative staff. The results show that SMAN 4 Palangka Raya manages financing from two main sources: BOS/BOSP funds from the central government and Education Implementation Costs (BPP) from parents. Budget planning is compiled in the RAPBS document involving various stakeholders in a participatory manner. The budget efficiency policy had a direct impact on the reduction of teachers' additional honoraria for activities outside their core teaching duties, as these were reclassified as part of routine responsibilities. Nevertheless, core school operations continued smoothly. The school responds to fiscal pressure through three adaptive strategies: flexible budget planning, appropriate prioritization of needs, and orderly financial administration. This study concludes that consistent application of transparency, accountability, and efficiency principles can sustain educational quality amid budget constraints.

Keywords: Fund Management; Budget Efficiency; Education Financing; RAPBS; Financial Transparency.

PENDAHULUAN

Menurut (Restarie et al., 2025), tata kelola pembiayaan pendidikan yang efektif dalam menghadapi efisiensi anggaran harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi agar penggunaan dana tetap optimal serta mampu menjaga mutu layanan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga pengelolaan dana sekolah perlu dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Pada tahun 2026, kebijakan efisiensi anggaran pendidikan menjadi tantangan bagi berbagai lembaga pendidikan, termasuk sekolah menengah atas, dalam mempertahankan kualitas layanan pendidikan di tengah

keterbatasan dana.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pengelolaan dana sekolah secara efektif menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas pembelajaran. Menurut (Windy, 2025), pengelolaan dana sekolah memerlukan perencanaan keuangan yang tepat, penggunaan dana yang transparan, serta penentuan prioritas pembiayaan agar kebutuhan pendidikan tetap terpenuhi. Sekolah dituntut untuk mampu menyusun perencanaan anggaran yang tepat, mengoptimalkan penggunaan dana, serta menetapkan prioritas program yang mendukung proses pembelajaran, pengembangan fasilitas, kegiatan akademik, dan pembelajaran berbasis teknologi.

Selain itu, pengelolaan dana sekolah yang efektif juga memerlukan kerja sama antara pihak sekolah, pemerintah, guru, peserta didik, dan orang tua dalam mendukung keberlangsungan program pendidikan. Keterbatasan anggaran bukan hanya menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah, tetapi juga menjadi dorongan bagi sekolah untuk lebih inovatif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang terencana dan tepat sasaran, sekolah diharapkan mampu mempertahankan kualitas pembelajaran, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang tetap kondusif meskipun berada dalam situasi keterbatasan anggaran.

Namun, pengelolaan dana sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran pendidikan tahun 2026. Menurut (Hisyam, 2025), efisiensi anggaran pendidikan memiliki dua sisi: jika dikelola dengan baik, anggaran mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengoptimalkan program prioritas, namun tanpa pengawasan yang memadai, anggaran justru berpotensi berdampak negatif terhadap motivasi guru maupun peserta didik. Secara ideal, pengelolaan dana sekolah seharusnya mampu mendukung seluruh kebutuhan operasional, pengembangan sarana prasarana, serta peningkatan mutu pendidikan secara optimal. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekolah masih mengalami keterbatasan dalam pengalokasian anggaran sehingga beberapa program pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia.

Oleh karena itu, sekolah perlu menerapkan manajemen pembiayaan yang terarah, efektif, dan efisien agar seluruh program pendidikan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengelolaan dana sekolah secara efektif dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pendidikan tahun 2026 di SMAN 4 Palangka Raya. Adapun pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana strategi pengelolaan dana sekolah yang diterapkan untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana sekolah, serta upaya yang dilakukan sekolah dalam mempertahankan mutu pendidikan di tengah keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana sekolah secara efektif, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran pendidikan, serta mengetahui strategi yang diterapkan oleh SMAN 4 Palangka Raya dalam mengoptimalkan penggunaan dana sekolah agar kegiatan pendidikan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di SMAN 4 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada bulan Mei 2026. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena sosial secara alami dan kontekstual, khususnya dalam aspek pengelolaan dana dan pembiayaan sekolah yang bersifat kompleks dan multidimensi (Sugiyono, 2019). (Sari et al., 2024) menjelaskan bahwa penelitian

deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang tepat untuk memperoleh gambaran mendalam tentang suatu fenomena pendidikan secara kontekstual tanpa melibatkan prosedur statistik. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah dua orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling, terdiri atas kepala sekolah dan kepala BPP yang sekaligus menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana.

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan salah satu elemen mendasar yang sangat menentukan kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. (Nengsi et al., 2025) menegaskan bahwa administrasi keuangan merupakan serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta pengawasan atas seluruh aktivitas keuangan organisasi, yang bertujuan mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan demi tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Dalam konteks nasional, pembiayaan pendidikan bersumber dari tujuh komponen pokok, yakni anggaran pendidikan nasional termasuk Dana BOS, anggaran provinsi, anggaran kota/kabupaten, komite sekolah, yayasan, serta sumbangan dari pihak donatur.

Pola serupa juga tercermin dalam sistem pembiayaan SMAN 4 Palangka Raya, di mana Dana BOS/BOSP dari pemerintah pusat menjadi tumpuan utama operasional sekolah, sementara Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang dibayarkan oleh orang tua siswa berperan sebagai komponen pelengkap. Kondisi ini mengindikasikan bahwa bantuan pemerintah belum sepenuhnya mampu menutup seluruh kebutuhan sekolah, sehingga partisipasi finansial orang tua siswa masih memegang peranan yang tidak dapat diabaikan. Kedua sumber pembiayaan ini bersifat komplementer dan saling melengkapi dalam menjamin keberlangsungan operasional serta peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dengan demikian, pengelolaan yang sinergis antara dana pemerintah dan kontribusi orang tua siswa menjadi kunci utama dalam mempertahankan kualitas layanan pendidikan di SMAN 4 Palangka Raya meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

Menurut (Muspawi et al., 2023), langkah awal yang esensial dalam pengelolaan dana pendidikan adalah menyelenggarakan forum bersama seluruh tenaga pendidik dan kependidikan guna membahas kebutuhan serta sasaran sekolah untuk kurun waktu tertentu, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, sebelum penyusunan RAPBS dilakukan. Proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak secara bersamaan juga diterapkan di SMAN 4 Palangka Raya, di mana para wakil kepala sekolah, koordinator mata pelajaran, koordinator laboratorium, pengelola perpustakaan, dan komite sekolah dilibatkan secara aktif dalam penyusunan RAPBS pada setiap awal tahun ajaran. Hal ini penting mengingat setiap penggunaan dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun pihak lain, harus senantiasa mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan mutu pendidikan menuntut tata kelola yang lebih baik, khususnya dalam aspek perencanaan pembiayaan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem persekolahan secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil menunjukkan bahwa SMAN 4 Palangka Raya mengandalkan dua sumber pembiayaan utama. Pertama, Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSP) yang bersumber dari pemerintah pusat, digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan siswa, terutama bagi siswa yang kurang mampu, serta mendukung operasional sekolah secara umum. Kedua, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang dibayarkan oleh orang tua atau wali siswa yang mampu, digunakan untuk melengkapi pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh dana BOS semata.

Narasumber menegaskan bahwa bantuan dari pemerintah tidak sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan operasional dan pengembangan sekolah. Oleh karena itu,

kontribusi dari orang tua siswa melalui BPP tetap menjadi komponen penting dalam sistem pembiayaan sekolah. (Maruf et al., 2024) menegaskan bahwa pembiayaan sekolah yang dikelola secara transparan dan akuntabel, termasuk melalui perencanaan anggaran yang melibatkan seluruh komponen sekolah, terbukti berperan signifikan dalam memaksimalkan mutu pendidikan. Kondisi ini mencerminkan pola pembiayaan pendidikan yang bersifat komplementer, di mana optimalisasi sumber dana dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi lembaga pendidikan (Farodis et al., 2026). Selain kedua sumber utama tersebut, sekolah juga melakukan penyesuaian anggaran secara internal ketika terdapat kebutuhan mendadak atau program tambahan dari dinas pendidikan.

Administrasi Keuangan

Sistem administrasi keuangan di SMAN 4 Palangka Raya dilaksanakan secara kombinasi, yakni menggunakan sistem manual dan digital. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun melalui platform pembayaran digital, namun setiap transaksi tetap diwajibkan disertai bukti pembayaran fisik agar dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Pelaporan penggunaan dana dilakukan secara terstruktur. Setiap kegiatan yang menggunakan dana sekolah wajib disertai proposal kegiatan, nota pembelian, daftar hadir peserta, dokumentasi foto, serta laporan pelaksanaan kegiatan.

Semua dokumen tersebut dikompilasi dan dibundel setiap akhir periode pelaporan. (Anwar & Fathoni, 2024) menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan yang menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi secara konsisten terbukti berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan, karena mendorong penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Praktik administrasi yang tertib ini sejalan pula dengan prinsip akuntabilitas keuangan publik sebagaimana diatur dalam (PP No. 48 Tahun 2008), yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran di SMAN 4 Palangka Raya dilakukan melalui penyusunan RAPBS pada awal tahun pelajaran baru, yaitu sekitar bulan Juli. RAPBS berfungsi sebagai pedoman utama pengelolaan keuangan sekolah sekaligus instrumen pengendalian penggunaan dana. Temuan ini selaras dengan pandangan (Windy, 2025) bahwa pengelolaan dana sekolah secara efektif memerlukan perencanaan keuangan yang tepat dan berbasis kebutuhan riil dari setiap bidang.

Proses penyusunan RAPBS melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meliputi para wakil kepala sekolah, koordinator mata pelajaran, koordinator laboratorium, pengelola perpustakaan, dan komite sekolah. Setiap koordinator menyampaikan kebutuhan sesuai bidang tugasnya, mulai dari kebutuhan alat praktik laboratorium, perlengkapan olahraga, pelatihan guru, hingga pengembangan fasilitas teknologi. Sekolah juga menyusun rencana jangka menengah hingga empat tahun ke depan, mencerminkan orientasi manajemen yang visioner dan sistematis. Dasar penentuan prioritas pembiayaan bertumpu pada kebutuhan paling mendesak yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pembelajaran.

Pengalokasian Dana Sekolah

Pengalokasian dana di SMAN 4 Palangka Raya dilakukan berdasarkan empat bidang pengelolaan, yaitu bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas. Kegiatan kesiswaan menjadi bidang yang paling banyak menyerap anggaran, mencakup perlombaan, pertandingan, olimpiade, dan pengembangan prestasi siswa. Dana sekolah juga dialokasikan untuk kebutuhan operasional pembelajaran, pengadaan sarana, pelaksanaan asesmen, dan pemeliharaan fasilitas.

Pembagian antara kebutuhan rutin dan pengembangan mutu dilakukan secara proporsional. Dana kebutuhan rutin digunakan untuk operasional harian, sedangkan dana pengembangan mutu diarahkan pada pengadaan komputer, TV interaktif, jaringan internet, dan pelatihan guru berbasis teknologi. Sekolah bahkan mempertimbangkan pelatihan guru terkait kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari perencanaan anggaran, mencerminkan respons adaptif terhadap perkembangan teknologi pendidikan. Pola pengalokasian ini sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran yang tepat sebagaimana dikemukakan (Farodis et al., 2026), bahwa setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang paling berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Administrasi Keuangan

Sistem administrasi keuangan di SMAN 4 Palangka Raya dilaksanakan secara kombinasi, yakni menggunakan sistem manual dan digital. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun melalui platform pembayaran digital, namun setiap transaksi tetap diwajibkan disertai bukti pembayaran fisik agar dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Pelaporan penggunaan dana dilakukan secara terstruktur.

Setiap kegiatan yang menggunakan dana sekolah wajib disertai proposal kegiatan, nota pembelian, daftar hadir peserta, dokumentasi foto, serta laporan pelaksanaan kegiatan. Semua dokumen tersebut dikompilasi dan dibundel setiap akhir periode pelaporan. Praktik administrasi yang tertib ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas keuangan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala.

Pengawasan dan Transparansi Keuangan

Transparansi diwujudkan melalui pelaporan penggunaan dana yang disampaikan kepada komite sekolah dan orang tua siswa sebanyak dua kali dalam satu tahun ajaran. Laporan tersebut memuat rincian penggunaan dana untuk seluruh program sekolah, termasuk kegiatan siswa, asesmen pembelajaran, perlombaan, pengembangan fasilitas, dan program lainnya. (Mursiyah et al., 2024) mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang lemah dalam pengelolaan dana BOS dapat membuka celah penyelewengan, sehingga mekanisme pelaporan yang terbuka kepada publik menjadi kunci pencegahannya.

(Maslufi et al., 2025) memperkuat hal ini dengan temuan bahwa transparansi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan anggaran. Keterbukaan informasi keuangan ini menciptakan akuntabilitas publik yang penting bagi kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan prinsip transparansi di SMAN 4 Palangka Raya diwujudkan melalui penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada orang tua siswa dan komite sekolah sebanyak dua kali dalam satu tahun ajaran. Praktik pelaporan yang terbuka ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam pengawasan penggunaan dana sekolah secara berkelanjutan.

Dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Strategi Adaptif Sekolah

Dalam (Inpres No. 1 Tahun 2025), tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD memberikan dampak langsung terhadap operasional SMAN 4 Palangka Raya. Dampak yang paling terasa adalah pengurangan honor tambahan bagi guru untuk kegiatan di luar tugas pokok pembelajaran. Sebelumnya, beberapa kegiatan tambahan seperti pendampingan perlombaan, bimbingan asesmen, dan kegiatan kesiswaan masih memberikan honor, namun kebijakan efisiensi menyebabkan komponen honor tersebut diklasifikasikan ulang sebagai bagian dari tugas pokok guru. Honor tambahan kini hanya

diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara resmi di luar jam kerja utama atau di luar tugas rutin sekolah.

Meskipun demikian, pihak sekolah menyatakan bahwa bantuan operasional pendidikan melalui BOS/BOSP tetap tersedia, sejalan dengan penegasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa program strategis seperti BOS dan tunjangan profesi guru tidak termasuk dalam komponen yang dipangkas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi bersifat selektif dan tidak mengganggu elemen pembiayaan yang esensial bagi keberlangsungan pembelajaran. Dalam merespons tekanan efisiensi tersebut, sekolah menerapkan tiga strategi adaptif.

Pertama, perencanaan anggaran yang lebih fleksibel, di mana program yang belum terlaksana dapat dialihkan ke program lain yang lebih mendesak. Kedua, penentuan skala prioritas yang lebih ketat agar penggunaan dana terfokus pada kebutuhan yang paling berdampak pada kualitas pendidikan. Ketiga, peningkatan tertib administrasi keuangan agar laporan pertanggungjawaban senantiasa sesuai dengan perencanaan. Temuan ini mengonfirmasi pentingnya penentuan prioritas pembiayaan dan perencanaan keuangan yang tepat dalam menghadapi tekanan kebijakan fiskal (Windy, 2025).

Implikasi

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan salah satu aspek krusial yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan proses pendidikan. Sebagaimana ditegaskan oleh (Nengsi et al., 2025), administrasi keuangan adalah suatu proses kompleks yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap seluas aktivitas keuangan dalam suatu organisasi, dengan tujuan akhir mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Sumber pembiayaan nasional mencakup tujuh komponen utama, yaitu anggaran pendidikan nasional termasuk Dana BOS, anggaran provinsi, anggaran kota/kabupaten anggota komite sekolah, anggaran yayasan, dan sumbangan donatur.

(Ningsih & Hapsari, 2025) menyatakan bahwa implementasi pengelolaan dana BOS harus dilakukan berdasarkan kebutuhan prioritas sekolah sehingga anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini sejalan dengan pola pembiayaan yang diterapkan di SMAN 4 Palangka Raya yang mengandalkan dana BOS/BOSP dari pemerintah pusat sebagai tulang punggung operasional sekolah, yang dilengkapi dengan biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dari orang tua siswa sebagai komponen komplementer, kondisi tersebut mencerminkan bahwa bantuan dari pemerintah tidak sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan, sehingga kontribusi dari orang tua siswa tetap menjadi komponen penting. (Muspawi et al., 2023), langkah utama dalam pengelolaan dana pendidikan adalah mengadakan pertemuan bersama seluruh tenaga pendidik dan kependidikan untuk membahas kebutuhan dan tujuan sekolah untuk periode tertentu, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, sebelum menyusun RAPBS.

Proses perencanaan yang melibatkan banyak pihak secara paralel di SMAN 4 Palangka Raya ini mencakup para wakil kepala sekolah, koordinator mata pelajaran, koordinator laboratorium, pengelola perpustakaan, dan komite sekolah dalam menyusun RAPBS setiap tahun ajaran baru. Mengingat bahwa dalam penggunaan dana yang ada, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, harus diperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan pengelolaan yang lebih baik dari segi perencanaan pembiayaan, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem persekolahan. Keterlibatan seluruh unsur sekolah ini memastikan bahwa perencanaan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan riil dari setiap bidang dan tidak bersifat sepihak. Proses partisipatif tersebut juga memperkuat rasa kepemilikan

bersama terhadap program-program yang direncanakan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai tata kelola pembiayaan di SMAN 4 Palangka Raya memberikan gambaran yang mendalam mengenai strategi dan resiliensi institusi pendidikan dalam menghadapi tantangan fiskal nasional. Fokus utama dari studi deskriptif kualitatif ini adalah menganalisis bagaimana sekolah mengelola anggarannya agar tetap efektif di tengah pemberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara yang dampaknya masih berlanjut pada tahun anggaran 2026. Melalui teknik pengumpulan data yang komprehensif berupa observasi langsung, wawancara mendalam bersama jajaran pimpinan serta pengelola keuangan sekolah, dan studi dokumentasi terhadap rencana anggaran, penelitian ini berhasil mengungkap mekanisme adaptasi sekolah dalam mempertahankan mutu pelayanan pendidikan di tengah keterbatasan dana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMAN 4 Palangka Raya menerapkan pola pembiayaan yang bersifat komplementer dengan mengandalkan dua sumber dana utama. Sumber pertama adalah Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS/BOSP) dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk membiayai operasional dasar dan menyubsidi siswa yang kurang mampu. Sumber kedua adalah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang dihimpun secara legal dari orang tua siswa yang mampu untuk melengkapi kebutuhan pengembangan mutu yang tidak dapat dipenuhi oleh dana BOS semata. Kedua sumber dana ini dikelola secara sistematis melalui penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) pada setiap awal tahun ajaran baru di bulan Juli. Proses perencanaan ini dilakukan secara partisipatif dan visioner dengan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, hingga koordinator unit seperti laboratorium dan perpustakaan, sehingga penganggaran benar-benar berbasis pada kebutuhan riil dan prioritas pembelajaran. Dalam pengalokasiannya, anggaran didistribusikan ke dalam empat bidang utama, yaitu kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat. Meskipun bidang kesiswaan menyerap anggaran paling besar untuk mendukung prestasi siswa dalam berbagai perlombaan, sekolah tetap menjaga keseimbangan proporsional antara kebutuhan operasional rutin dan pengembangan mutu jangka panjang. Respons adaptif terhadap perkembangan zaman ditunjukkan dengan tetap dialokasikannya dana untuk pengadaan fasilitas teknologi modern, seperti komputer, televisi interaktif, jaringan internet yang memadai, serta program pelatihan kecerdasan buatan (AI) bagi para guru. Penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 pada tahun anggaran 2026 memberikan dampak langsung berupa penghapusan honor tambahan bagi guru pada kegiatan di luar tugas pokok, karena komponen tersebut kini diklasifikasikan ulang sebagai bagian dari tugas rutin. Menghadapi tekanan regulasi ini, SMAN 4 Palangka Raya menerapkan tiga strategi taktis, yaitu perencanaan anggaran yang lebih fleksibel, penentuan skala prioritas yang lebih ketat, dan peningkatan tertib administrasi keuangan. Akuntabilitas diperkuat melalui sistem pelaporan kombinasi manual-digital yang mewajibkan ketersediaan bukti fisik yang sah untuk setiap transaksi. Selain itu, sistem pengawasan berlapis diterapkan baik secara internal oleh kepala sekolah dan komite, maupun secara eksternal oleh Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan BPK. Transparansi publik juga diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada orang tua siswa sebanyak dua kali dalam setahun.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa penerapan prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi secara konsisten dapat menjaga mutu pendidikan tetap kondusif di tengah keterbatasan anggaran. Secara praktis, studi ini menegaskan pentingnya penyusunan anggaran berbasis data kebutuhan riil serta mendesaknya panduan teknis yang jelas dari pengambil kebijakan agar kebijakan efisiensi anggaran nasional tidak mengorbankan kualitas proses pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi sekolah-sekolah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola keterbatasan anggaran tanpa mengorbankan standar mutu pendidikan. Penelitian lanjutan yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak satuan pendidikan perlu dilakukan guna memperkuat generalisasi temuan ini dan memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan pembiayaan pendidikan di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., & Fathoni, M. D. (2024). Penerapan Prinsip Efisiensi dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS: Implikasinya pada Mutu Pendidikan. 6, 319–329. <https://doi.org/10.51339/akademika.v6i2.3568>
- Baidowi, A., Maruf, H., Apriana, D., & Putri, S. N. (2024). Peran pembiayaan sekolah dalam memaksimalkan mutu pendidikan. 3(2), 21–28. <https://jurnalsains.id/index.php/maslahah/article/view/157>
- Farodis, R., H. ., Hidayat, M. ., & Ratnawati, R. (2026). Optimalisasi Sumber Dana Dan Anggaran Dalam Meningkatkan Efisiensi Lembaga Pendidikan. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 67-73. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/763>
- Hisyam, M. (2025). Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan: Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan dan Kualitas Outputnya. *Islamic Managemen: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 21–27. <https://www.jmpi.stit-alhikmahwk.ac.id/jmpi/article/view/88>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>
- Maslufi, L. Z., Maryam, A., & Seno, M. F. (2025). Pengaruh Transparansi dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Sekolah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jbau>
- Mursiyah, U., Zachroh, S. A., & Aprilliantoni. (2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS: Mengidentifikasi penyebab penyelewengan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 6(3), 260–268. <https://doi.org/10.51278/aj.v6i3.1588>
- Muspawi, M., & Lukita, M. (2025). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Dosen : Jurnal Pendidikan* , 14 (1), 99-110. <https://doi.org/10.31849/lectura.v14i1.12237>
- Nengsi, S., Maulidika, D., Sabri, A., & Hidayatullah, R. (2025). Pengelolaan Keuangan Sekolah: Sumber Pembiayaan dan Pertanggungjawaban dalam Satuan Pendidikan. *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(1), 144–162. <https://doi.org/10.62383/edukasi.v2i1.1000>
- Ningsih, S., & Hapsari, A. N. (2025). Optimalisasi pembiayaan pendidikan: Studi kasus dana BOS dan BOP di SMA Negeri 12 Semarang. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5). <https://doi.org/10.62281/v3i5.1918>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4862>
- Restarie, M. D., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Strategi tata kelola pembiayaan pendidikan usai efisiensi anggaran: Systematic literature review. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 300–310.
- Sari, A. R., Husnawati, H. A., Suryono, J., Marzuki, & Mulyapradana, A. (2024). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Windy, P. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Mengelola Keuangan Sekolah Secara Efektif. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 02(01), 350–355.
<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/issue/view/32>